

**EVALUASI DAERAH KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
MENGUNAKAN METODE *FUZZY C-MEANS* (FCM) DAN *TECHNIQUE
FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION*
(TOPSIS)**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh
GHINA SALSABILA FIRDAUS
H72216052

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

**EVALUASI DAERAH KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
MENGUNAKAN METODE *FUZZY C-MEANS* (FCM) DAN *TECHNIQUE
FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION*
(TOPSIS)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Program Studi Matematika



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun oleh
GHINA SALSABILA FIRDAUS
H72216052

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : GHINA SALSABILA FIRDAUS

NIM : H72216052

Program Studi : Matematika

Angkatan : 2016

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul "EVALUASI DAERAH KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE *FUZZY C-MEANS* (FCM) DAN *TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION* (TOPSIS)". Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 07 Juli 2020

Yang menyatakan,



GHINA SALSABILA FIRDAUS
NIM. H72216052

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

Nama : GHINA SALSABILA FIRDAUS

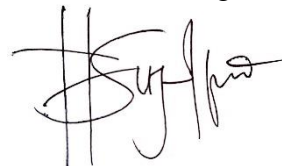
NIM : H72216052

Judul Skripsi : EVALUASI DAERAH KETAHANAN PANGAN PROVINSI
JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE *FUZZY C-
MEANS* (FCM) DAN *TECHNIQUE FOR ORDER
PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION*
(TOPSIS)

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 07 Juli 2020

Pembimbing



Yuniar Farida, M.T
NIP. 197905272014032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

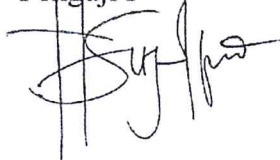
Skripsi oleh

Nama : GHINA SALSABILA FIRDAUS
NIM : H72216052
Judul Skripsi : EVALUASI DAERAH KETAHANAN PANGAN PROVINSI
JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE *FUZZY C-
MEANS* (FCM) DAN *TECHNIQUE FOR ORDER
PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION*
(TOPSIS)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 10 Juli 2020

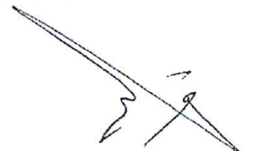
Mengesahkan,
Tim Penguji

Penguji I



Yuniar Farida, M.T
NIP. 197905272014032002

Penguji II



Dr. Moh. Hafiyusholeh, M. Si
NIP. 198002042014031001

Penguji III



Dian Candra Rini Novitasari, M.Kom
NIP. 198511242014032001

Penguji IV



Wika Dianita Utami, M.Sc
NIP. 199206102018012003

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag
NIP. 197312272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghina Salsabila Firdaus
NIM : H72216052
Fakultas/Jurusan : Saintek/Matematika
E-mail address : ghisalsa06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EVALUASI DAERAH KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGGU-
NAKAN FUZZY C-MEANS (FCM) DAN TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE

BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

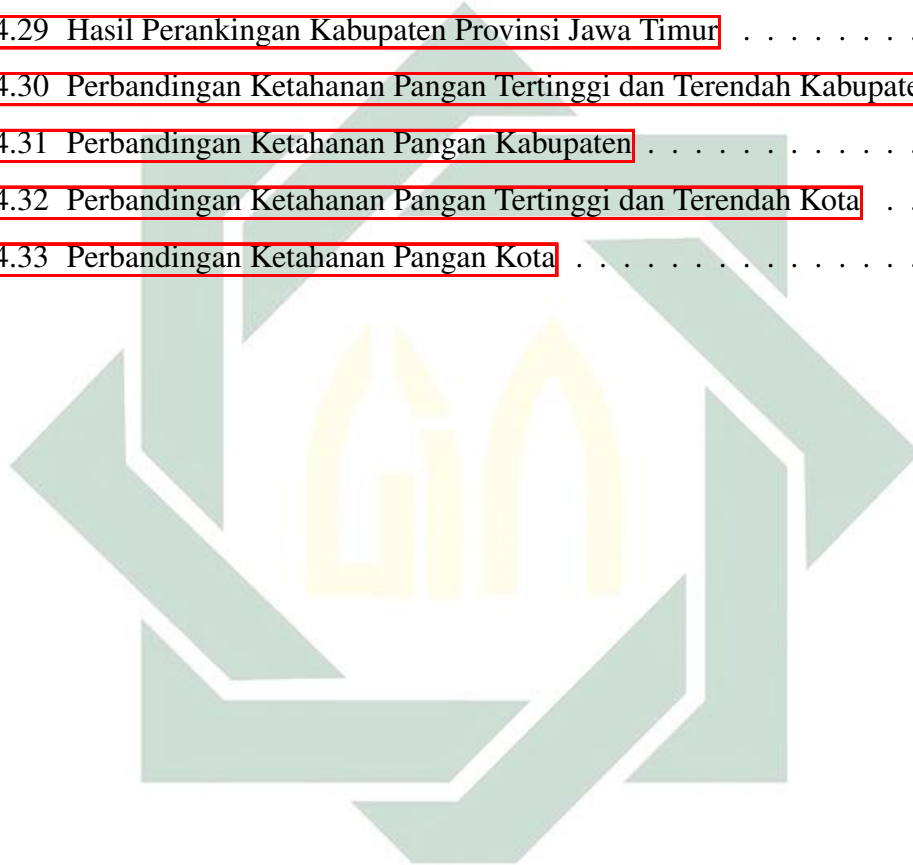
Surabaya, 22 Agustus 2020

Penulis

(GHINA SALSABILA FIRDAUS)

2.4.1. <i>Fuzzy C-Means (FCM)</i>	29
2.4.2. <i>Algoritma Fuzzy C-Means</i>	29
2.5. <i>Validasi Hasil Cluster</i>	32
2.6. <i>Multiple Criteria Decision Making (MCDM)</i>	33
2.7. <i>Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution</i> (TOPSIS)	34
III METODE PENELITIAN	37
3.1. <i>Jenis Penelitian</i>	37
3.2. <i>Sumber Penelitian</i>	38
3.3. <i>Variabel Penelitian</i>	38
3.4. <i>Tahapan Penyelesaian Penelitian</i>	42
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. <i>Penilaian Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur</i>	47
4.2. <i>Clustering dengan Metode Fuzzy C-Means</i>	47
4.2.1. <i>Clustering Kabupaten</i>	48
4.2.2. <i>Analisis Hasil Cluster Kabupaten</i>	62
4.2.3. <i>Validasi Cluster Kabupaten</i>	62
4.2.4. <i>Clustering Kota</i>	65
4.2.5. <i>Analisis Hasil Cluster Kota</i>	66
4.2.6. <i>Validasi Cluster Kota</i>	67
4.3. <i>Perankingan dengan Metode TOPSIS</i>	69
4.3.1. <i>Perankingan Cluster</i>	69
4.3.2. <i>Analisis Hasil Perankingan Cluster</i>	76
4.3.3. <i>Perankingan Anggota Cluster</i>	77
4.3.4. <i>Analisis Hasil Perankingan Anggota Cluster</i>	86
4.3.5. <i>Perankingan Keseluruhan</i>	87
4.4. <i>Analisis Hasil Perankingan Keseluruhan</i>	89
4.4.1. <i>Hasil Perankingan Kabupaten</i>	89
4.4.2. <i>Hasil Perankingan Kota</i>	92
V PENUTUP	95

4.24 <i>Sorting</i> Data Aspek Ketersediaan Pangan Tahun 2018	83
4.25 Hasil Perankingan Anggota <i>Cluster</i> Kabupaten Aspek Keterjangkauan	84
4.26 Hasil Perankingan Anggota <i>Cluster</i> Kabupaten Aspek Pemanfaatan	85
4.27 Hasil Perankingan Anggota <i>Cluster</i> Kota Aspek Keterjangkauan dan Pemanfaatan	86
4.28 Hasil Perankingan Kota Provinsi Jawa Timur	87
4.29 Hasil Perankingan Kabupaten Provinsi Jawa Timur	88
4.30 Perbandingan Ketahanan Pangan Tertinggi dan Terendah Kabupaten	90
4.31 Perbandingan Ketahanan Pangan Kabupaten	91
4.32 Perbandingan Ketahanan Pangan Tertinggi dan Terendah Kota	93
4.33 Perbandingan Ketahanan Pangan Kota	93



pemenuhan kebutuhan pangan untuk kedepannya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan pangan maka ketahanan pangan perlu menjadi fokus utama. Ketersediaan pangan, dan segala hal yang berkaitan dengan kualitas pangan perlu diantisipasi agar perubahan situasi yang terjadi tidak berpengaruh pada ketahanan pangan dan gizi (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, 2018).

Permasalahan pangan telah menarik perhatian dunia sejak tahun 1948. Untuk mengatasi permasalahan gizi, kelaparan serta ketahanan pangan diadakan pertemuan singkat melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setelah itu pada tahun 1974 diadakan pertemuan tingkat tinggi *World Food Conference* (Gantina, 2018). Pertemuan tersebut merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang pertama kali dilaksanakan di Roma. Pada pertemuan tersebut, *Food Agriculture Organization* (FAO) telah mengibarkan bendera perang untuk mengatasi kelaparan. FAO berusaha untuk membebaskan semua orang baik tua, muda maupun anak-anak dari bahaya kelaparan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perwujudan untuk mengatasi kelaparan. Dengan begitu, semua orang akan terhindar dari kelaparan dan kekurangan gizi serta dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Namun hasil upaya FAO untuk meningkatkan pemerataan pangan masih belum sesuai harapan (Sibuea, 2002). Perjuangan pemerataan pangan masih terus dilakukan, hingga pada tahun 1996 di Roma dalam kegiatan *The World Food Summit*, terjadi kesepakatan para kepala negara dan pemerintah untuk berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap orang, sehingga setiap orang dalam waktu dan kondisi apapun berhak untuk memperoleh makanan yang cukup, baik dari segi gizi maupun keamanannya (Dinas Ketahanan Pangan, 2017).

Seperti pada penjelasan sebelumnya, Indonesia telah mengatur perihal pangan dalam UU No. 7 Tahun 1996 mengenai seluruh ketentuan pangan dilihat dari segi mutu, gizi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keamanan pangan seperti pada segi kemasan, proses produksi, dan pengawasan pada peredaran makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangan merupakan salah satu hal penting bagi keberlangsungan hidup manusia, karena pangan berperan sebagai sumber pokok bagi kehidupan manusia (UU RI, 1996). Pangan sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Kenyataannya, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator terpenting dalam pengembangan suatu negara (Rajizadeh et al, 2019). Dalam UU No. 7 Tahun 1996, dijelaskan bahwa salah satu hak asasi manusia ialah hak untuk memperoleh pangan. Keterbatasan persediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan masalah bagi stabilitas ekonomi. Sehingga sudah menjadi tugas suatu negara untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan (Pujayanti, 2011).

Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1971 untuk mengatasi masalah krisis pangan terutama bagi negara-negara berkembang. Pada saat itu, ketahanan pangan berfokus pada pembebasan daerah dari permasalahan produksi serta krisis *supply* pangan (Pieris, 2015). Kemudian bertahun-tahun semenjak *World Food Conference* di Roma, Italia pada tahun 1974, konsep ketahanan pangan telah berkembang. Ada sekitar dua ratus definisi dengan istilah yang berbeda mengenai ketahanan pangan (Maxwell, 1996). Berdasarkan penjelasan mengenai sejarah serta permasalahan pangan diatas, diperlukan perhatian khusus untuk mengatasi daerah-daerah yang masih memiliki ketahanan pangan yang rendah. Pemerataan pangan perlu dilakukan agar suatu daerah tidak tertinggal dengan daerah lainnya.

tersebut perlu dilakukan pemetaan wilayah dengan cara membagi wilayah kabupaten atau kota kedalam suatu kelompok yang memiliki karakteristik sama. Pada proses pengelompokan tersebut diperlukan kriteria yang digunakan sebagai penilaian. Kriteria tersebut disusun dan dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Pada awalnya, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) disusun dan digunakan pada level nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun IKP sesuai dengan tiga kriteria yaitu aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan konsumsi pangan. Namun dalam penerapannya IKP hanya dapat digunakan sampai level provinsi, sedangkan untuk mengevaluasi daerah ketahanan pangan diperlukan cakupan yang lebih kecil lagi untuk mengetahui kondisi dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian menyusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) berdasarkan ketersediaan data yang ada di tingkat Kabupaten/Kota (Bulog, 2014).

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tingkat kabupaten terdiri dari tiga kriteria yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sedangkan untuk kota hanya terdapat dua kriteria yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Penentuan kriteria tersebut didasarkan pada tiga pilar ketahanan pangan. Pada setiap kriteria, terdapat subkriteria yang digunakan untuk penilaian daerah ketahanan pangan. Secara keseluruhan untuk kabupaten terdapat sembilan subkriteria yang digunakan pada penilaian yaitu rasio konsumsi normatif, garis kemiskinan, pengeluaran untuk pangan lebih dari 65%, akses listrik, pendidikan perempuan, akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan, *stunting* dan angka harapan hidup. Sedangkan untuk kota yang membedakan adalah tidak adanya subkriteria rasio konsumsi normatif (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, 2018).

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dilakukan pengelompokan pada kabupaten atau kota yang memiliki karakteristik yang sama. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan pada proses pengelompokan, salah satunya adalah metode *Fuzzy C-means*. Metode *Fuzzy C-Means* digunakan untuk pengelompokan daerah ketahanan pangan berdasarkan kriteria sesuai dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). *Fuzzy C-Means* merupakan algoritma pengelompokan yang mudah diterapkan, sederhana, serta dapat digunakan untuk mengelompokkan data dengan jumlah yang besar (Rivaldo, 2019). Setelah dilakukan pengelompokan dapat dilakukan perankingan untuk mengetahui bagaimana urutan suatu daerah berdasarkan tingkat ketahanan pangannya. Namun, banyaknya kriteria dan subkriteria menyebabkan perhitungan menjadi rumit sehingga digunakan metode *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM). MCDM merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang hasilnya berupa alternatif terbaik dari alternatif yang ada, sesuai dengan kriteria tertentu. Salah satu teknik yang terkenal pada MCDM ialah *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* atau biasa dikenal dengan istilah TOPSIS (Arifin, 2015). Kelebihan dari metode TOPSIS yaitu konsepnya sederhana dan mudah dipahami, menilai sisi kekurangan dari alternatif tidak hanya kelebihannya. Dengan dilakukan proses *clustering* terlebih dahulu sebelum proses perankingan, maka dapat diketahui kelompok-kelompok daerah sesuai dengan tingkat ketahanan pangannya. Untuk mengetahui urutan tingkat ketahanan pangan kelompok tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS. Setelah itu dilakukan validasi *cluster* dengan metode PCI untuk menentukan jumlah *cluster* yang optimal (Oktariani, Andreswari, & Setiawan, 2017).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode FCM-TOPSIS terkait

dengan evaluasi daerah ketahanan pangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Hasil *cluster* dengan menggunakan metode FCM dapat digunakan sebagai sistem perankingan untuk mengetahui urutan daerah berdasarkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur, dari daerah yang memiliki ketahanan pangan tinggi hingga daerah ketahanan pangan rendah (Zaenab, 2018). Selama ini provinsi Jawa Timur telah menopang kebutuhan 15 provinsi lain karena berlimpahnya komoditas pangan khususnya beras (Kanalsatu, 2019). Namun permasalahan yang terjadi adalah semakin berkurangnya lahan pertanian. Saat ini banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri yang akan berakibat buruk pada sektor pertanian. Sehingga penilaian ketahanan pangan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pangan di Jawa Timur. Dengan memperbaiki kondisi pangan di Jawa Timur maka dapat berdampak baik bagi provinsi lain (Faizal, 2018).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode *Fuzzy C-Means* (FCM) dan TOPSIS telah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2017) yang berjudul Perbandingan Indeks *Xie Beni* dan Indeks *Partition Coefficient* yang dikombinasikan dengan *Fuzzy C-Means* dan *Simple Additive Weighting* untuk Pemilihan Bibit Kelapa Sawit. Pada penelitian tersebut metode FCM digunakan karena memiliki kelebihan untuk mengelompokkan data baik dalam jumlah besar maupun kecil (Nugraha, 2017). Penelitian dengan menggunakan metode FCM dan TOPSIS juga telah dilakukan oleh Victory Tyas P. Swindari, Riyanarto Sarno, dan Dian C. R. Novitasari. dengan judul *Integration of Fuzzy C-Means Clustering and TOPSIS (FCM-TOPSIS) with Silhoutte Analysis for Multi Criteria Parameter Data* (Swindari, V. T. P., Sarno, R., & Novitasari,

(2018). Chunguang Bai, Dileep Dhavale, dan Joseph Sarkis juga melakukan penelitian FCM dan TOPSIS yang berjudul *Integrating Fuzzy C-Means and TOPSIS for performance evaluation: An application and comparative analysis*, penggunaan *clustering* merupakan pengembangan model MCDM dalam membuat keputusan (Bai, Dhavale, & Sarkis, 2014). Selain itu dalam penelitian lainnya, metode FCM dan TOPSIS telah dilakukan oleh Rusdi Rivaldo yang berjudul *Kombinasi Fuzzy C-Means dan TOPSIS untuk Pemilihan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) di Universitas Sriwijaya*. Peneliti menyebutkan bahwa hasil perankingan dengan menggunakan metode TOPSIS didapatkan persentase sebesar 76,9%, sedangkan untuk kombinasi dari metode FCM-TOPSIS didapatkan persentase 95,4% berdasarkan hasil aktual (Rivaldo, 2019). Oleh karena itu, penulis menggunakan metode FCM dan TOPSIS pada penelitian ini sebagai evaluasi daerah ketahanan pangan di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil *clustering* daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan menggunakan metode *Fuzzy C-Means*?
2. Bagaimana hasil perankingan daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)?

evaluasi untuk menilai ketahanan pangan dari masing-masing daerah (IKP, 2018).

2.2. Evaluasi Daerah Ketahanan Pangan

Evaluasi secara istilah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan yang berfungsi untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen sebagai pengukur suatu objek yang kemudian hasilnya akan dilakukan perbandingan sesuai dengan tolak ukur sehingga didapatkan suatu kesimpulan (Yunanda, 2009). Pemahaman mengenai definisi evaluasi telah banyak dibahas, salah satu contohnya terdapat dalam buku yang berjudul Metode Riset Evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai proses pengumpulan informasi pada suatu objek, kemudian dilakukan penilaian pada objek tersebut dan dibandingkan dengan kriteria, standar ketentuan (Hadi, 2011). Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi ialah suatu proses pengumpulan, analisis, serta penyajian informasi mengenai objek yang akan dievaluasi dan kemudian dilakukan penilaian, dimana hasil dari penilaian tersebut akan dibandingkan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012).

Evaluasi daerah ketahanan pangan berarti suatu penilaian terhadap ketahanan pangan suatu daerah terhadap segala aspek. Dalam sistem penilaian situasi ketahanan pangan diperlukan serangkaian kriteria yang berfungsi sebagai tolak ukur pada penilaian tersebut. Penilaian dari masing-masing kriteria tersebut menghasilkan suatu penilaian dengan kualitas ketahanan pangan yang sesuai dengan masing-masing daerah. Pada evaluasi daerah ketahanan pangan dilakukan sistem perangkingan untuk mengetahui urutan ketahanan pangan dari daerah yang memiliki tingkat ketahanan pangan tinggi hingga daerah yang memiliki ketahanan pangan rendah. Sehingga pemerintah dapat menentukan program yang tepat untuk mengatasi daerah-daerah dengan ketahanan pangan rendah sehingga tidak

Pada *Global Food Security Index* tahun 2014 dapat diketahui bahwa tingkat ketahanan pangan yang tinggi dimiliki oleh negara-negara maju khususnya yang memiliki pendapatan tinggi (Nurhemi, 2014). Pada tahun 2016, posisi ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat ke-71 dari 113 negara. Pada tahun 2017 posisi Indonesia naik dan berada pada peringkat ke-69 (IKP, 2018). Kemudian pada tahun 2018 Indonesia kembali mengalami peningkatan yaitu pada peringkat ke-65 (Global Food Security Index, 2018).

2. *Global Hunger Index* (GHI)

Selain GFI, terdapat GHI yang merupakan singkatan dari *Global Hunger Index* (GHI). GHI merupakan suatu alat yang dirancang untuk mengukur tingkat kelaparan secara global, regional, dan nasional. GHI dihitung setiap tahun untuk mengetahui tingkat kemajuan ataupun kemunduran dalam mengatasi permasalahan pangan. Pembentukan GHI dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perjuangan melawan kelaparan dan sebagai pembanding antara wilayah satu dengan lainnya. Sehingga diharapkan ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi wilayah yang mengalami tingkat ketahanan pangan rendah (Global Hunger Index, 2019).

GHI disusun oleh *International Food Policy Research Institute* atau biasa disingkat IFPRI. Sama halnya dengan GFI, penilaian ini digunakan untuk penilaian ketahanan pangan antar negara, dan yang membedakan ialah aspek yang digunakan pada penilaian. Keempat aspek tersebut adalah proporsi *undernourishment*, *balita wasting*, *balita stunting*, serta angka kematian bayi (IKP, 2018). Upaya pengumpulan data yang digunakan sebagai kriteria dilakukan oleh berbagai badan PBB dan multilateral lainnya. Data-data tersebut bersumber dari *Food and Agriculture Organization of the United*

Nations (FAO), *United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation* (UN IGME), dan lain sebagainya ([Global Hunger Index, 2019](#)).

3. *Rice Bowl Index* (RBI)

Selain GFSI dan GHI, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) lainnya adalah *Rice Bowl Index* (RBI). RBI dibentuk oleh Syngenta yang bekerja sama dengan *Frontier Strategy Group* mengenai ketahanan pangan di wilayah Asia Pasifik. Terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu *Farm Level Factors*, *Demand and Price*, *Policy and Trade*, dan *Environmental Factors* dengan memperhatikan aspek ketahanan pangan (*food security*) dan stabilitas pangan (*stability or sustainability*) ([Nurhemi, 2014](#)).

RBI dibentuk melalui inisiatif yang dilakukan oleh Syngenta serta para dewan penasehat terkemuka untuk menilai seberapa kuat kemampuan suatu negara dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan ([Frontier Strategy Group, 2019](#)). Terdapat 15 negara di Asia Pasifik dan Indonesia menempati urutan ke-10 pada tahun 2016 ([IKP, 2018](#)).

2.3.2. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

IKP yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kriteria untuk penilaian ketahanan pangan antar negara, sedangkan untuk level nasional Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun IKP dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Namun penilaian tersebut hanya sebatas penilaian daerah provinsi, sehingga diperlukan suatu penilaian yang lebih spesifik di kabupaten/kota. Oleh karena itu, Badan Ketahanan Pangan melakukan analisis lebih lanjut dalam skala lebih rendah pada penentuan IKP bagi kabupaten/kota. Penyusunan IKP harus sesuai dengan metodologi serta data-data yang ada di

dapat mengarah pada ketersediaan pangan dalam perspektif mikro dan makro, dimana perspektif mikro menggambarkan ketersediaan pangan di level rumah tangga atau individu, sedangkan perspektif makro menggambarkan ketersediaan pangan pada level regional atau nasional. Namun menurut Riely (1995) dalam Weingartner (2004), konteks ketersediaan pangan lebih cocok digunakan untuk menggambarkan ketersediaan pangan dalam skala nasional (Hendro, 2010). Sehingga ketersediaan pangan dapat diartikan bahwa negara harus menjamin tercukupinya kebutuhan pangan bagi warganya (UNS, 2016).

Pada aspek ketersediaan pangan, faktor kenaikan atau penurunan produksi pangan berpengaruh terhadap kecukupan pangan. Potensi yang dimiliki tiap wilayah berbeda-beda, ada wilayah yang merupakan penghasil tanaman hortikultura, perkebunan dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan iklim dan cuaca serta kondisi tanah di masing-masing wilayah berbeda, sehingga tanaman yang dihasilkan pun menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya (Nikmah, 2015). Pangan yang dihasilkan dapat berupa produk sereal, rempah, sayuran, buah-buahan, berbagai jenis kacang, minyak nabati, gula serta produk hewani. Kebutuhan utama kalori harian yang diperlukan tubuh adalah sumber pangan yang mengandung karbohidrat, porsi yang diperlukan sebesar setengah dari kebutuhan energi tiap orang dalam sehari. Sehingga yang akan digunakan dalam perhitungan adalah karbohidrat yang berasal dari produk sereal yaitu padi, jagung, umbi kayu dan umbi jagung yang digunakan untuk memenuhi kondisi pangan di tingkat kabupaten dan kota (Badan Ketahanan Pangan, 2018).

Berdasarkan aspek ini dapat diketahui bagaimana kemampuan suatu

- a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- b. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
- c. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

2. Aspek Pemanfaatan Pangan

- a. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
- b. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
- c. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
- d. Persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting)
- e. Angka harapan hidup pada saat lahir

Terdapat sedikit perbedaan antara kriteria yang digunakan untuk kabupaten dan kota. Untuk wilayah kota hanya digunakan 8 subkriteria dikarenakan pada aspek ketersediaan pangan daerah pada tingkat perkotaan produksi tidak berasal dari wilayah sendiri, melainkan dari perdagangan antar wilayah.

2.4. *Fuzzy Clustering*

Fuzzy Clustering adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan *cluster* optimal pada ruang vektor berdasarkan euclidian jarak antar vector. Pada *fuzzy clustering* setiap titik data memiliki nilai keanggotaan di setiap *cluster* yang mungkin dan suatu data akan menuju *cluster* tertentu yang ditandai dengan nilai keanggotaan tertinggi pada *cluster* tersebut (Miller et al, 2009).

Pemanfaatan Pangan	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0.05	BPS dan Dinas Kesehatan
	Presentasi balita dengan tinggi badan dibawah standar (<i>stunting</i>)	0.05	Dinas Kesehatan
	Angka harapan hidup pada saat lahir	0.10	BPS
	Sub Total	0.40	

Tabel 3.3 Variabel Kriteria Kota

Kriteria	Sub Kriteria	Bobot	Sumber
	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	0.20	BPS
Aspek Keterjangkauan Pangan	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	0.125	BPS
	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0.125	BPS
	Sub Total	0.45	
	Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun	0.08	BPS
Aspek Pemanfaatan Pangan	Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih	0.18	BPS
	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan	0.08	BPS dan Dinas Kesehatan

1. Input data kriteria kabupaten/kota yang telah disebutkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Kemudian dilakukan penyamaan persepsi apabila terjadi perbedaan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu apabila semakin tinggi nilai data pada subkriteria, maka semakin rentan kondisi pangan di wilayah tersebut.
2. Dengan metode *Fuzzy C-Means* data kriteria dikelompokkan menjadi beberapa cluster. Pada penelitian digunakan *cluster* sebanyak 3, 4, dan 5 untuk diuji *cluster* manakah yang terbaik.
3. Langkah selanjutnya dilakukan validasi *cluster* untuk menguji hasil kualitas *cluster* terbaik. Validasi *cluster* dilakukan dengan menggunakan metode *Partition Coefficient Index (PCI)*.
4. Setelah dilakukan proses validasi *cluster* dan terpilih satu *cluster* yang akan digunakan. Langkah selanjutnya yaitu proses perankingan dengan menggunakan metode TOPSIS. Proses perankingan dilakukan untuk perankingan *cluster* pada tiap kriteria, perankingan anggota *cluster* pada masing-masing *cluster* yang terdapat di tiap kriteria dan perankingan untuk keseluruhan kriteria.
5. Hasil akhir dari perankingan keseluruhan kriteria dapat digunakan untuk melihat tingkat ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun tahapan penyelesaian dengan menggunakan metode *Fuzzy C-Means* dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dijelaskan pada Gambar 3.2 sebagai berikut:

data alternatif untuk kabupaten sebanyak 29 dan kota sebanyak 9 serta m adalah atribut.

- b. Langkah selanjutnya yaitu menentukan :
- 1). Jumlah *cluster* (c), yaitu menentukan banyaknya *cluster* yang akan digunakan pada penelitian sesuai dengan kebutuhan.
 - 2). Pangkat/bobot (w), yang merupakan nilai eksponen.
 - 3). Iterasi maksimum ($MaxIter$), merupakan batas dari proses perulangan, apabila dalam proses perulangan sudah mencapai nilai iterasi maksimum maka proses perulangan atau looping akan berhenti.
 - 4). Error terkecil (e), yaitu perulangan akan berakhir apabila nilai yang didapatkan sesuai dengan batasan dari nilai error terkecil.
 - 5). Fungsi objektif awal ($P_0 = 0$)
 - 6). Iterasi awal ($t = 1$)
- c. Membangkitkan nilai acak random yang berfungsi sebagai elemen matriks partisi awal yaitu matriks U .
- d. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung pusat *cluster* ke- k , dengan menggunakan rumus sesuai dengan persamaan 2.17 yang merupakan lokasi rata-rata dari tiap *cluster*.
- e. Selanjutnya menghitung fungsi objektif sebagai syarat perulangan untuk mendapatkan pusat *cluster* yang tepat. Kemudian akan diketahui suatu data cenderung masuk ke *cluster* tertentu sesuai dengan Persamaan 2.18.
- f. Menghitung perubahan matriks partisi sesuai dengan Persamaan 2.19.
- g. Mengecek kondisi berhenti, apabila telah memenuhi dilanjutkan dengan validasi hasil cluster sesuai dengan Persamaan 2.20.

2. Langkah-langkah *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*(TOPSIS)ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Menentukan matriks keputusan ternormalisasi (*normalized decision matrix*) yang dilakukan sesuai dengan perhitungan pada Persamaan [2.21](#).
- b. Menentukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot (*weighted normalized decision matrix*) yang ditunjukkan sesuai Persamaan [2.22](#).
- c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif dengan menggunakan Persamaan [2.23](#).
- d. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak antara nilai alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif menggunakan Persamaan [2.25](#) dan Persamaan [2.26](#).
- e. Selanjutnya menentukan nilai preferensi dengan menggunakan persamaan [2.27](#).
- f. Langkah terakhir yaitu dengan melakukan pengurutan nilai preferensi, sehingga didapatkan urutan nilai preferensi dari nilai tertinggi hingga terendah dan begitupula sebaliknya.

pangan pada variabel kota sehingga proses perhitungan dilakukan secara terpisah.

4.2.1. *Clustering* Kabupaten

Pada variabel alternatif, jumlah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur sebanyak 29 kabupaten. Pada proses *clustering* kabupaten, terdapat kriteria dan subkriteria yang digunakan sebagai penilaian ketahanan pangan. Terdapat tiga kriteria yang digunakan yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Sebelum dilakukan proses *clustering*, dilakukan penyamaan persepsi pada subkriteria terlebih dahulu. Perbedaan persepsi terdapat pada subkriteria rata-rata lama sekolah perempuan dan angka harapan hidup. Pada tujuh subkriteria lainnya semakin besar nilai pada subkriteria maka wilayah tersebut semakin rentan pangan. Sedangkan pada kedua subkriteria tersebut berlaku sebaliknya, yaitu semakin tinggi nilai maka wilayah tersebut semakin tahan pangan. Apabila dikaitkan dengan Persamaan 2.23 dan 2.24, maka yang termasuk pada atribut biaya yaitu subkriteria rata-rata lama sekolah perempuan dan angka harapan hidup, sedangkan yang termasuk dalam atribut keuntungan yaitu tujuh subkriteria lainnya.

Pada penelitian ini dilakukan proses penyamaan persepsi sehingga semua subkriteria termasuk dalam atribut keuntungan. Proses penyamaan persepsi telah ditunjukkan oleh Badan Ketahanan Pangan pada panduan penyusunan ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan telah menyediakan form aplikasi perhitungan penyamaan persepsi sehingga data yang ingin disamakan persepsinya akan otomatis berubah, sebagai contoh untuk sub kriteria angka harapan hidup langkah yang harus dilakukan yaitu 100 dikurangi dengan nilai asli pada data angka harapan hidup.

Tabel 4.1 Penyamaan Persepsi

No	Kabupaten	AHH	Penyamaan Persepsi AHH
1	Pacitan	71,52	$100 - 71,52 = 28,48$
2	Ponorogo	72,43	27,57
3	Trenggalek	73,35	26,65
4	Tulungagung	73,34	26,26
5	Blitar	73,16	26,84
⋮	⋮	⋮	⋮
29	Sumenep	70,94	29,06

Hal ini juga berlaku untuk variabel kota, untuk keseluruhan data yang digunakan pada proses *clustering* kabupaten ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Aspek Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Kabupaten

No	Kabupaten	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Keterjangkauan Pangan		
			Kemiskinan	Pengeluaran pangan	Tanpa listrik
1	Pacitan	0,39	14,19	36,4	0,44
2	Ponorogo	0,24	10,36	32,24	0,23
3	Trenggalek	0,53	12,02	36,13	0
4	Tulungagung	0,56	7,27	24,61	0,11
5	Blitar	0,62	9,72	24,21	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
29	Sumenep	0,57	20,16	51,55	0,28

Tabel 4.3 Data Aspek Pemanfaatan Pangan Kabupaten

No	Kabupaten	Aspek Pemanfaatan Pangan				
		Pendidikan Perempuan	Akses air bersih	Rasio penduduk	Stunting	AHH
1	Pacitan	3,31	30,64	1,07	26,34	28,48
2	Ponorogo	3,35	19,03	0,68	30,50	27,57
3	Trenggalek	3,03	48,88	0,72	39,89	26,65
4	Tulungagung	2,3	31,13	0,47	26,17	26,26
5	Blitar	3,2	33,56	0,71	27,36	26,84
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
29	Sumenep	5,37	21,93	0,97	34,33	29,06

Pada penelitian ini dilakukan penentuan jumlah *cluster* pada variabel kabupaten, yaitu c (*cluster*) = 3, 4, dan 5. Penentuan *cluster* dilakukan pada setiap kriteria. Proses *clustering* dilakukan sesuai dengan data pada Tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut.

1. Aspek Keterjangkauan Pangan

Perhitungan *cluster* ($c = 3$) :

- Menentukan matriks X berukuran $n \times m$, dimana n merupakan data sampel variabel alternatif kabupaten sebanyak 29 dan m adalah atribut pada aspek keterjangkauan pangan sebanyak 3, dengan X_{ij} merupakan data sampel ke- i atribut ke- j , dengan $i = 1, 2, 3, \dots, 29$ dan $j = 1, 2, 3$. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk matriks sebagai berikut.

Pada perhitungan diatas hasil yang didapatkan yaitu 1805,9109, dimana $1805,9109 > 0,000001$ kondisi belum terpenuhi maka $t = t+1$, dan dilakukan pengulangan perhitungan pusat *cluster* untuk iterasi ke-2 dengan menggunakan derajat keanggotaan baru (μ_{ik}) hingga kondisi terpenuhi. Hasil akhir pusat *cluster* dan derajat keanggotaan pada perhitungan FCM *cluster* 3 adalah sebagai berikut.

$$V = \begin{bmatrix} 11,9688 & 37,7517 & 0,1605 \\ 16,6107 & 52,5685 & 0,2109 \\ 9,8326 & 25,4141 & 0,0694 \end{bmatrix}$$

$$\mu_{ik} = \begin{bmatrix} 0,9307 & 0,0238 & 0,0455 \\ 0,5631 & 0,0410 & 0,3959 \\ 0,9696 & 0,0088 & 0,0215 \\ 0,0354 & 0,0079 & 0,9566 \\ 0,0077 & 0,0017 & 0,9906 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0,1356 & 0,8343 & 0,0301 \\ 0,0495 & 0,9344 & 0,0161 \end{bmatrix}$$

Setelah dilakukan perhitungan *clustering* dengan $c = 3$, hasil yang didapatkan berupa pusat *cluster* dan derajat keanggotaan. Hasil dari derajat keanggotaan dapat digunakan untuk mengetahui suatu daerah termasuk kedalam *cluster* 1, 2 atau 3. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan derajat keanggotaan tertinggi. Sebagai contoh, pada Tabel 4.6 untuk kabupaten Pacitan dapat dilihat bahwa derajat keanggotaan tertinggi terdapat pada *cluster* 1, sehingga kabupaten Pacitan merupakan anggota dari *cluster* 1. Sedangkan untuk kabupaten Tulungagung derajat keanggotaan tertinggi terdapat pada *cluster* 2, sehingga

Tabel 4.10 Data Aspek Pemanfaatan Pangan Kota

NO	Kota	Aspek Pemanfaatan Pangan				
		Pendidikan Perempuan	Akses air bersih	Rasio penduduk	Stunting	AHH
1	Kota Kediri	1,11	31,22	0,0288	35,1	26,2
2	Kota Blitar	1,17	27,61	0,0303	26,5	26,64
3	Kota Malang	0,86	15,28	0,0245	23,4	27,07
4	Kota Probolinggo	2,5	16,82	0,0445	29,9	30
5	Kota Pasuruan	1,79	10,89	0,0369	34,9	28,82
6	Kota Mojokerto	0,86	19,69	0,0254	20,9	26,99
7	Kota Madiun	0,73	6,38	0,0156	29,1	27,41
8	Kota Surabaya	1,18	3,71	0,0289	28,6	26,02
9	Kota Batu	1,95	11,39	0,2020	28,3	27,63

4.2.5. Analisis Hasil Cluster Kota

Selain wilayah kabupaten, proses *clustering* juga dilakukan pada wilayah kota. Kriteria penilaian ketahanan pangan pada wilayah kota terdiri dari 2 kriteria yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Perbedaan kriteria pada variabel kabupaten dan kota terdapat pada kriteria aspek ketersediaan, karena pada variabel kota tidak terdapat kriteria tersebut. Untuk pengujian *cluster* pada variabel kota juga menggunakan *cluster* 3, 4, dan 5 yang kemudian akan dipilih *cluster* terbaik. Hasil *Fuzzy C-Means* berupa pusat *cluster* dan derajat keanggotaan. *Clustering* wilayah kota dilakukan untuk mengetahui wilayah kota mana saja yang termasuk daerah dengan ketahanan pangan rendah, sedang ataupun tinggi. Namun untuk mengetahui hal tersebut diperlukan proses perankingan *cluster* untuk

Tabel 4.11 Validasi *Clustering Kota* ($c = 3$)

i	μ_{i1}^2	μ_{i2}^2	μ_{i3}^2	$\sum_{k=1}^3 \mu_{ik}^2$
1	0,001087	0,010699	0,745804	0,757590
2	0,000028	0,004305	0,863310	0,867642
3	0,000002	0,958093	0,000395	0,958490
4	0,000029	0,864124	0,004234	0,868387
5	0,999996	0,000000	0,000000	0,999996
6	0,000012	0,003221	0,883310	0,886542
7	0,000030	0,709607	0,023136	0,732773
8	0,000002	0,000211	0,968434	0,968647
9	0,000030	0,002685	0,888735	0,891449
Jumlah				7,93152

$$\begin{aligned}
 PCI &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c \mu_{ik}^2 \right) \\
 &= \frac{1}{9} \left(\sum_{i=1}^9 \sum_{k=1}^3 \mu_{ik}^2 \right) \\
 &= \frac{1}{9} \cdot 7,93152 \\
 &= 0,8813
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil uji validasi menggunakan PCI untuk $c = 3$ pada aspek keterjangkauan pangan adalah 0,8813. Dengan langkah yang sama, dilakukan perhitungan untuk $c = 4$ dan 5. Perhitungan juga dilakukan pada aspek pemanfaatan pangan dengan $c = 3, 4$ dan

Tabel 4.13 Max Min Aspek Keterjangkauan Pangan Kabupaten

	y_{ij}		
	0,07905	0,04072	0,04394
	0,10970	0,05670	0,05774
	0,06494	0,02741	0,01898
Max	0,10970	0,05670	0,05774
Min	0,06494	0,02741	0,01898

$$A^+ = 0,10970; 0,05670; 0,05774 \text{ dan}$$

$$A^- = 0,06494; 0,02741; 0,01898$$

- 4). Menghitung jarak antara nilai alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Perhitungan dilakukan sesuai dengan Persamaan 2.25 dan 2.26 sebagai berikut.

Solusi ideal positif dan negatif data ke-1

$$S_1^+ = \sqrt{(0,10970 - 0,07905)^2 + (0,05670 - 0,04072)^2 + (0,05774 - 0,04394)^2}$$

$$= 0,0372$$

$$S_1^- = \sqrt{(0,07905 - 0,06494)^2 + (0,04072 - 0,02741)^2 + (0,04394 - 0,01898)^2}$$

$$= 0,0316$$

Tabel 4.14 Jarak Solusi Ideal Positif dan Negatif

i	S_i^+	S_i^-
1	0,0372	0,0316
2	0	0,0661
3	0,0661	0

Tabel 4.20 Hasil Perankingan *Cluster* Kota

Kriteria	<i>Cluster</i>	T	Ranking	Kota
Aspek	1	0,4334	2	Pasuruan
Keterjangkauan	2	0,0029	3	Malang, Probolinggo, Madiun
Pangan	3	0,6405	1	Kediri, Blitar, Mojokerto, Surabaya, Batu
Aspek	1	0,4384	3	Malang, Mojokerto
Pemanfaatan	2	0,3787	4	Pasuruan
Pangan	3	0,7573	1	Kediri, Blitar
	4	0,5646	2	Probolinggo, Batu
	5	0,0647	5	Madiun, Surabaya

4.3.2. Analisis Hasil Perankingan *Cluster*

Hasil perankingan *cluster* menggunakan metode TOPSIS berdasarkan nilai preferensi pada setiap *cluster*. *Cluster* yang memiliki kerentanan pangan tinggi ditunjukkan dengan nilai preferensi yang tertinggi, sebaliknya nilai preferensi terendah menunjukkan wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang baik. Sebagai contoh pada variabel kabupaten aspek keterjangkauan pangan terdiri dari 3 *cluster*, setelah dilakukan perankingan *cluster* 1 memiliki nilai preferensi sebesar 0,4592, kemudian *cluster* 2 dengan nilai sebesar 1 dan *cluster* 3 memiliki nilai preferensi 0. Sehingga apabila diurutkan dari nilai tertinggi, didapatkan bahwa posisi ranking pertama ditempati oleh *cluster* 2 dengan nilai preferensi 1, kemudian dilanjutkan dengan *cluster* 1 dan di posisi terakhir terdapat *cluster* 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa *cluster* 2 merupakan wilayah yang memiliki tingkat ketahanan pangan paling rentan, *cluster* 1 memiliki tingkat kerentanan sedang dan *cluster* 3 merupakan wilayah kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling tinggi.

Pada variabel kota aspek keterjangkauan, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS didapatkan *cluster* 1 dengan nilai preferensi 0,4334 menduduki urutan kedua, *cluster* 2 dengan nilai preferensi 0,0029 diurutan terakhir yaitu ketiga dan *cluster* 3 dengan nilai preferensi sebesar 0,6405 menduduki urutan pertama yang merupakan kelompok wilayah dengan kerentanan pangan tertinggi. Begitupula untuk kriteria lainnya baik di wilayah kabupaten maupun kota.

4.3.3. Perankingan Anggota Cluster

Perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS selain digunakan untuk proses perankingan *cluster* juga digunakan untuk perankingan anggota *cluster*. Setelah didapatkan urutan *cluster* dari tingkat kerentanan pangan tinggi hingga rendah, untuk mendapatkan hasil perankingan pada suatu kriteria maka dilakukan perankingan pada anggota tiap-tiap *cluster*. Langkah yang dilakukan sama seperti pada proses perankingan *cluster*. Matriks keputusan yang digunakan merupakan data subkriteria yang tersedia pada Tabel 4.2 dan 4.3 untuk data wilayah kabupaten sedangkan untuk wilayah kota digunakan data pada Tabel 4.9 dan 4.10.

Berikut adalah perhitungan manual proses perankingan *cluster* dua di wilayah kabupaten yang terdiri dari kabupaten Bondowoso, Situbondo, Nganjuk, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

1. Menentukan matriks ternormalisasi

Tabel 4.24 *Sorting* Data Aspek Ketersediaan Pangan Tahun 2018

Kabupaten	Data	Kabupaten	Data
Sidoarjo	1,68	Situbondo	0,51
Pamekasan	1,08	Lumajang	0,5
Malang	0,89	Banyuwangi	0,49
Probolinggo	0,82	Jombang	0,45
Kediri	0,78	Bondowoso	0,42
Pasuruan	0,69	Pacitan	0,39
Sampang	0,66	Nganjuk	0,39
Blitar	0,62	Magetan	0,29
Gresik	0,6	Madiun	0,27
Bangkalan	0,59	Bojonegoro	0,27
Sumenep	0,57	Tuban	0,27
Tulungagung	0,56	Ponorogo	0,24
Trenggalek	0,53	Lamongan	0,21
Jember	0,52	Ngawi	0,18
Mojokerto	0,52		

Sorting data pada Tabel 4.24 menunjukkan bahwa kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan ketersediaan pangan yang paling rendah diposisi pertama yaitu 1,68, kemudian di posisi kedua yaitu kabupaten Pamekasan dan seterusnya. Sedangkan kabupaten Ngawi merupakan wilayah dengan ketersediaan pangan tinggi dengan nilai 0,18. Hasil perankingan anggota *cluster* wilayah kabupaten pada aspek lainnya ditunjukkan oleh Tabel 4.25 dan 4.26.

Tabel 4.25 Hasil Perankingan Anggota *Cluster* Kabupaten Aspek Keterjangkauan

Ranking <i>Cluster</i>	Kabupaten	Aspek Keterjangkauan	
		T	Ranking
1	Bangkalan	0,85419	1
	Sumenep	0,57092	2
	Sampang	0,55565	3
	Nganjuk	0,53741	4
	Probolinggo	0,45694	5
	Bondowoso	0,1286	6
	Pamekasan	0,12787	7
	Situbondo	0,03024	8
2	Ngawi	0,86365	1
	Pacitan	0,77455	2
	Jember	0,70251	3
	Bojonegoro	0,59638	4
	Ponorogo	0,36417	5
	Tuban	0,32184	6
	Madiun	0,21739	7
	Trenggalek	0,16975	8
	Kediri	0,12372	9
	Pasuruan	0,10701	10
	Lumajang	0,0885	11
	Magetan	0,06158	12
	Jombang	0,03981	13
3	Lamongan	0,94432	1
	Gresik	0,66663	2
	Banyuwangi	0,56615	3
	Tulungagung	0,48117	4
	Malang	0,38763	5
	Mojokerto	0,36269	6
	Sidoarjo	0,34242	7
	Blitar	0,33038	8

Tabel 4.26 Hasil Perankingan Anggota *Cluster* Kabupaten Aspek Pemanfaatan

Ranking <i>Cluster</i>	Kabupaten	Aspek Pemanfaatan	
		T	Ranking
1	Situbondo	0,67954	1
	Jember	0,62778	2
	Trenggalek	0,56375	3
	Probolinggo	0,52193	4
	Bondowoso	0,50171	5
	Bangkalan	0,39884	6
	Pasuruan	0,36699	7
	Pamekasan	0,22488	8
2	Banyuwangi	0,72919	1
	Lumajang	0,71583	2
	Pacitan	0,65017	3
	Blitar	0,61347	4
	Kediri	0,60749	5
	Tulungagung	0,52064	6
	Nganjuk	0,51909	7
	Jombang	0,45636	8
	Mojokerto	0,39223	9
	Lamongan	0,13076	10
3	Sampang	0,88174	1
	Sumenep	0,84847	2
	Malang	0,81475	3
	Bojonegoro	0,79372	4
	Ngawi	0,78656	5
	Madiun	0,71288	6
	Ponorogo	0,68485	7
	Tuban	0,65952	8
	Magetan	0,49296	9
	Sidoarjo	0,40331	10
	Gresik	0,11644	11

Tabel 4.29 Hasil Perankingan Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Kabupaten	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Ranking Keseluruhan	T
Pacitan	22	10	11	18	0,4572
Ponorogo	27	13	25	3	0,7166
Trenggalek	13	16	3	24	0,3247
Tulungagung	12	25	14	13	0,5433
Blitar	8	29	12	14	0,5117
Kediri	5	17	13	21	0,4013
Malang	3	26	21	12	0,5643
Lumajang	17	19	10	16	0,4748
Jember	15	11	2	25	0,2882
Banyuwangi	18	24	9	15	0,5104
Bondowoso	20	6	5	22	0,3349
Situbondo	16	8	1	26	0,27
Probolinggo	4	5	4	29	0,1175
Pasuruan	6	18	7	23	0,3334
Sidoarjo	1	28	28	10	0,616
Mojokerto	14	27	17	9	0,6208
Jombang	19	21	16	11	0,6087
Nganjuk	21	4	15	17	0,4608
Madiun	24	15	24	5	0,7147
Magetan	23	20	27	1	0,8024
Ngawi	29	9	23	8	0,6574
Bojonegoro	26	12	22	7	0,6659
Tuban	25	14	26	2	0,7288
Lamongan	28	22	18	4	0,7159
Gresik	9	23	29	6	0,6785
Bangkalan	10	1	6	28	0,197
Sampang	7	3	19	20	0,4043
Pamekasan	2	7	8	27	0,1995
Sumenep	11	2	20	19	0,4406

4.4. Analisis Hasil Perankingan Keseluruhan

Setelah didapatkan hasil untuk perankingan *cluster* dan anggota *cluster* maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan proses perankingan TOPSIS untuk perankingan keseluruhan. Hasil perankingan tersebut didapatkan dari hasil ranking tiap-tiap kriteria dan kemudian dilakukan proses perhitungan TOPSIS. Nilai preferensi tertinggi yang merupakan urutan pertama, menyatakan daerah yang memiliki ketahanan pangan yang tinggi. Sebaliknya, daerah dengan nilai preferensi terendah dinyatakan sebagai daerah yang memiliki tingkat ketahanan pangan rendah atau kerentanan pangan yang tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat wilayah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat ketahanan pangannya.

4.4.1. Hasil Perankingan Kabupaten

Pada aspek ketersediaan pangan hanya terdapat satu kriteria yaitu rasio konsumsi normatif, oleh karena itu hanya dilakukan pengurutan berdasarkan data kriteria. Pada aspek tersebut kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan tingkat kerentanan tertinggi yang berhubungan dengan ketersediaan pangan di wilayah tersebut, sedangkan kabupaten dengan ketersediaan pangan paling tinggi adalah kabupaten Ngawi. Aspek tersebut menunjukkan bagaimana ketersediaan pangan di suatu wilayah, apakah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat setempat atau bahkan kekurangan bahan makanan. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, kabupaten Ngawi merupakan wilayah yang memiliki ketersediaan pangan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Untuk kriteria kedua yaitu aspek keterjangkauan pangan, pada Tabel [4.29](#) kabupaten Blitar merupakan kabupaten dengan keterjangkauan pangan tertinggi

Tabel 4.31 Perbandingan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kabupaten	Aspek Keterjangkauan		Aspek Pemanfaatan		Keseluruhan	
	Rank FCM-Topsis	Rank BKP	Rank FCM-Topsis	Rank BKP	Rank FCM-Topsis	Rank BKP
Pacitan	20	19	19	16	18	15
Ponorogo	17	9	5	5	3	4
Trenggalek	14	16	27	22	24	20
Tulungagung	5	2	16	6	13	5
Blitar	1	4	18	13	14	11
Kediri	13	11	17	17	21	18
Malang	4	6	9	10	12	17
Lumajang	11	12	20	20	16	19
Jember	19	15	28	28	25	24
Banyuwangi	6	3	21	19	15	11
Bondowoso	24	25	25	27	22	25
Situbondo	22	22	29	24	26	22
Probolinggo	25	26	26	29	29	29
Pasuruan	12	13	23	21	23	21
Sidoarjo	2	1	2	2	10	9
Mojokerto	3	5	13	7	9	6
Jombang	9	8	14	11	11	8
Nganjuk	26	20	15	15	17	16
Madiun	15	17	6	9	5	7
Magetan	10	10	3	4	1	2
Ngawi	21	21	7	14	8	14
Bojonegoro	18	18	8	12	7	13
Tuban	16	23	4	8	2	12
Lamongan	8	14	12	3	4	3
Gresik	7	7	1	1	6	1
Bangkalan	29	27	24	26	28	26
Sampang	27	29	11	23	20	28
Pamekasan	23	24	22	25	27	27
Sumenep	28	28	10	18	19	23

4.4.2. Hasil Perankingan Kota

Pada perankingan kota hal yang membedakan dengan perankingan kabupaten ialah tidak adanya aspek ketersediaan pangan, sehingga hanya terdapat dua kriteria yang dilakukan pada proses perhitungan. Berdasarkan aspek keterjangkauan, posisi pertama dengan keterjangkauan pangan terendah ditunjukkan oleh kota Batu. Hal tersebut berbeda dengan penilaian oleh badan ketahanan pangan. Berdasarkan penilaian badan ketahanan pangan, kota Pasuruan merupakan kota dengan keterjangkauan pangan terendah. Sedangkan wilayah kota dengan keterjangkauan pangan tertinggi adalah kota Malang. Hal tersebut sesuai dengan penilaian badan ketahanan pangan pada kriteria keterjangkauan pangan

Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek pemanfaatan pangan. Penilaian badan ketahanan pangan untuk kota dengan pemanfaatan pangan terendah adalah kota Probolinggo. Sedangkan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian wilayah kota dengan pemanfaatan pangan terendah adalah kota Kediri. Untuk hasil pemanfaatan pangan tertinggi, berdasarkan hasil penilaian pemerintah dan hasil perhitungan menghasilkan hasil yang sama yaitu kota Surabaya sebagai kota dengan pemanfaatan pangan tertinggi.

Selain itu juga dilakukan perhitungan perankingan keseluruhan untuk menentukan kota mana yang merupakan kota dengan ketahanan pangan tertinggi dan terendah. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.28, kota yang memiliki ketahanan pangan terendah adalah kota Kediri. Sedangkan menurut BKP kota Pasuruan merupakan kota dengan ketahanan pangan terendah. Untuk kota dengan ketahanan pangan tertinggi, hasil yang didapatkan dari perhitungan dan badan ketahanan pangan adalah sama, yaitu kota Madiun.

Tabel 4.32 Perbandingan Ketahanan Pangan Tertinggi dan Terendah Kota

Kriteria	Ketahanan Pangan	Rank FCM-Topsis	Rank BKP
Aspek Keterjangkauan	Tertinggi	Malang	Malang
	Terendah	Batu	Pasuruan
Aspek Pemanfaatan	Tertinggi	Surabaya	Surabaya
	Terendah	Kediri	Probolinggo
Keseluruhan	Tertinggi	Madiun	Madiun
	Terendah	Kediri	Pasuruan

Hasil keseluruhan perbandingan penilaian ketahanan pangan antara Badan Ketahanan Pangan dan perhitungan FCM TOPSIS untuk wilayah kota dari tingkat ketahanan pangan tinggi ke rendah ditunjukkan pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33 Perbandingan Ketahanan Pangan Kota

Kota	Aspek Keterjangkauan		Aspek Pemanfaatan		Keseluruhan	
	Rank FCM-Topsis	Rank BKP	Rank FCM-Topsis	Rank BKP	Rank FCM-Topsis	Rank BKP
Kediri	6	8	9	8	9	8
Blitar	5	7	8	6	7	6
Malang	1	1	4	3	2	2
Probolinggo	4	3	6	9	5	7
Pasuruan	8	9	3	7	3	9
Mojokerto	3	4	5	4	6	4
Madiun	2	2	2	2	1	1
Surabaya	7	5	1	1	4	3
Batu	9	6	7	5	8	5

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian ketahanan pangan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *Fuzzy C-Means* dan TOPSIS, terdapat beberapa perbedaan dengan hasil penilaian Badan Ketahanan Pangan. Perbedaan perhitungan tersebut disebabkan oleh proses perhitungan yang berbeda. Proses perhitungan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dengan cara mengalikan data kriteria dengan bobot yang telah ditentukan, kemudian diurutkan untuk mengetahui hasil ranking. Sedangkan pada penelitian ini, sebelum proses perankingan dilakukan *clustering* terlebih dahulu menggunakan metode *Fuzzy C-Means*. Proses *clustering* dilakukan untuk mempertimbangkan kedekatan data. Sehingga wilayah kabupaten dan kota dapat dikelompokkan dengan memperhatikan kesamaan karakteristik. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diranking menggunakan metode TOPSIS untuk mengetahui tingkat ketahanan pangannya.

ketahanan pangan tertinggi adalah kabupaten Magetan dan yang terendah adalah Probolinggo. Sedangkan untuk penilaian ketahanan pangan di wilayah kota, ketahanan pangan tertinggi ditunjukkan oleh kota Madiun, sedangkan ketahanan pangan terendah atau kerentanan pangan tertinggi ditunjukkan oleh kota Kediri.

5.2. Saran

Setelah menggunakan metode FCM-TOPSIS dalam proses perankingan daerah ketahanan pangan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, penulis ingin menyampaikan beberapa saran. Secara umum metode ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja yang bisa diandalkan, hal tersebut ditunjukkan dengan urutan ranking yang tidak jauh berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah dengan metode pengukuran lainnya terutama pada posisi ranking teratas dan terbawah. Namun meski demikian, tetap saja ada perbedaan ranking yang lumayan banyak pada posisi lainnya. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dicoba dengan menggunakan GIS untuk mengetahui peta sebaran ketahanan pangan sesuai dengan perbedaan warnanya selain itu dapat digunakan metode MCDM lainnya seperti metode PROMETHEE dan ELECTRE.

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). *Arah Kebijakan dan Strategi BKP*. <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/arah-kebijakan-dan-strategi-bkp>
- Badan Ketahanan Pangan. (2018). *Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018*. Retrieved from [http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat Ketersediaan/Bidang Ketersediaan/panduan-fsva-nasional-buku-i-08032018.pdf](http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/panduan-fsva-nasional-buku-i-08032018.pdf)
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2018). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018*. <http://bkp.pertanian.go.id/>
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2018). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018*. <http://bkp.pertanian.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Bai, C., Dhavale, D., & Sarkis, J. (2014). Integrating Fuzzy C-Means and TOPSIS for performance evaluation: An application and comparative analysis. *Expert Systems with Applications*, 41(9), 4186–4196. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.12.037>
- Balioti, V., Tzimopoulos, C., & Evangelides, C. (2018). Multi-Criteria Decision Making Using TOPSIS Method Under Fuzzy Environment. Application in Spillway Selection. *Proceedings*, 2(637), 1–8.
- Bulog. (2014). *Ketahanan Pangan*. <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>
- Dinas Ketahanan Pangan. (2017). *Problem Ketahanan Pangan Global (Global*

- Miller, D.J., Nelson, C.A., Cannon, M.B., Cannon, K.P. (2009). Comparison of Fuzzy Clustering Methods and Their Applications to Geophysics Data. *Applied Computational Intelligence and Soft Computing*.
- Nikmah, F. (2015). *Analisis Kerawanan Pangan di Indonesia dengan Pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Square*. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Nugraha, F. W. (2017). *Perbandingan Indeks Xie Beni dan Indeks Partition Coefficient yang dikombinasikan dengan Fuzzy C-Means dan Simple Additive Weighting untuk Pemilihan Bibit Kelapa Sawit*. Universitas Gajah Mada.
- Nurhemi, Soekro, S.R.I., & Suryani R, G. (2014). Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TPF dan Indeks Ketahanan Pangan. *Working Paper*.
- Oktariani, Deta., Andreswari, Desi., Setiawan, Yudi. (2017). Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemetaan Prioritas Perbaikan Jalan dan Jembatan Nasional di Provinsi Bengkulu menggunakan Metode TOPSIS dan *Fuzzy C-Means*. *Jurnal Rekursif*, 5(2), 166-179.
- Pieris, K. W. D. (2015). Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Depedensi dan Gender (Women in Development). *Hubungan Internasional*, 8(1).
- Pujayanti, A. (2011). Politik Pangan di Era Globalisasi. *Politica*, 2(1).
- Raharjo, J., Stok, R. E., & Yustina, R. (2000). Penerapan Multi-Criteria Decision Making dalam Pengambilan Keputusan Sistem Perawatan. *Jurnal Teknik Industri*, 2(1), 1–12
- Rajijzadeh, A., Tavakoli, M., Hajipour, M., Rabiey-Faradonbeh, M., Salehi-Abargouei, A., Bonab, A.M., & Nadjarzadeh, A. (2019). Food Security Status

- of Pregnant Women in Yazd, Iran, 2014-2015. *Journal of Nutrition and Food Security*, 4(3), 152-160
- Rivaldo, Rusdi. (2019). *Kombinasi Fuzzy C-Means dan TOPSIS untuk Pemilihan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) di Universitas Sriwijaya*. Universitas Sriwijaya
- Shahroudi, K., & Tonekaboni, S. M. S. (2012). Application of TOPSIS Method to Supplier Selection in Iran Auto Supply Chan. *Journal of Global Strategic Management*, 6(2), 123–131.
- Sibuea, P. (2002). *Kemiskinan, Rawan Gizi, dan "World Food Summit"*. <http://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Swindiarto, V. T. P., Sarno, R., & Novitasari, D. C. R. (2018). Integration of Fuzzy C-Means Clustering and TOPSIS (FCM-TOPSIS) with Silhouette Analysis for Multi Criteria Parameter Data. *Proceedings - 2018 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication: Creative Technology for Human Life, Isemantic 2018*, 463–468. <https://doi.org/10.1109/ISEMANTIC.2018.8549844>
- Ulfah, A. N., & Uyun, S. (2015). Analisis Kinerja Algoritma Fuzzy C-Means dan K-Means pada Data Kemiskinan. *Jatissi*, 1(2), 139–148.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. (1996). <http://hukum.unsrat.ac.id/>. Diakses pada 20 September 2019.
- Universitas Sebelas Maret. (2016). Darurat Kelembagaan Pangan di Indonesia. <https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/darurat-kelembagaan-pangan-di-indonesia.html>

- Wahyono, A. (2015). *Klastering Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan Metode Fuzzy C-Means*. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Wirawan. (2012). *Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, M. (2016). *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yunanda, M. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zaenab, D. S. SP. (2018). *Implementasi Multi Criteria Decision Making (MCDM) untuk Evaluasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy C-means dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- ...